

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PADA PASAR INDUK AMUNTAI

Muhammad Aldi¹, Muhammad Arsyad², Siti Paulina³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: woiwoi1213@gmail.com

ABSTRAK

Pasar induk Amuntai merupakan pasar yang memiliki peran penting bagi aset pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Fenomena masalah ini yaitu masih kurangnya penerapan aturan oleh pihak pengelola pasar, kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang di sediakan di pasar induk Amuntai, dan masih banyaknya pedagang yang kurang mengetahui atau memahami apa maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar pada pasar induk Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama yaitu dialog mendalam dengan informan, pengamatan lapangan, dan penelusuran dokumen. Pemilihan partisipan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan melibatkan dua belas informan kunci. Proses analisis data dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pemilahan informasi penting, penyusunan data secara sistematis, dan perumusan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan membercheck.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai cukup baik, terlihat dari indikator : penyampaian informasi cukup baik karena masih ada pedagang yang tidak mengetahui atau kurang sosialisasi, kejelasan informasi kurang baik karena masih ada pedagang yang kurang memahami tentang peraturan tersebut, konsistensi sudah baik karena informasi yang disampaikan tetap sama, jumlah petugas sudah baik karena petugas yang diturunkan untuk mengelola pasar sudah mencukupi, sedangkan ketersediaan fasilitas kurang baik karena masih belum terpenuhi, proses pengangkatan petugas baik karena sudah sesuai, kemampuan petugas kurang baik karena kurangnya wawasan petugas tentang peraturan, komitmen petugas kurang baik karena masih lalai dalam tugasnya, adanya SOP baik karena memang adanya SOP yang diberikan tersebut, dan pelaksanaan sesuai SOP cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi. Faktor penghambat yaitu sarana prasarana yang belum terpenuhi serta kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan peraturan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu jumlah petugas sudah mencukupi dan adanya SOP yang diberikan kepada petugas agar dapat dijalankan dengan baik.

Disarankan kepada UPTD Pasar sebaiknya melakukan perbaikan atau mencukupi fasilitas yang belum tersedia, petugas yang diturunkan agar lebih tegas dalam melakukan penertiban kepada pedagang, dan perlu kesadaran pedagang dalam menjaga lingkungan di sekitar.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

The Amuntai main market is a market that has an important role for North Hulu Sungai Regency government assets. The phenomenon of this problem is still there lack of enforcement of rules by market managers, lack of facilities or The infrastructure provided at the Amuntai main market, and many more traders who do not know or understand the meaning and objectives of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Market Management in markets Amuntai's parent. This research aims to determine implementation North Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning Market Management at the Amuntai Main Market and the factors involved influence it.

The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data sources were taken by purposive withdrawal of informants

sampling totaling 12 people. After the data is collected it is then analyzed with data reduction techniques, data presentation, and verification or withdrawal conclusion. The data credibility test in this research is an extension observation, increasing perseverance, triangulation, analysis of negative cases, using reference materials, and holding member checks.

The research results show that the implementation of regional regulations Hulu Sungai Utara Regency Number 17 of 2013 concerning Market Management At the Amuntai Main Market it is quite good, as seen from the indicator: delivery the information is quite good because there are still traders who don't know or lack of socialization, clarity of information is not good because there are still traders those who don't understand the rules, consistency is good because the information conveyed remains the same, the number of officers is good because the officers deployed to manage the market are sufficient, meanwhile The availability of facilities is not good because the process is still not fulfilled The appointment of officers is good because it is appropriate, the officers' abilities are not good Due to the officers' lack of insight into the regulations, the officers' commitment is lacking good because they are still negligent in their duties, the existence of an SOP is good because it exists The SOP provided, and the implementation according to the SOP is quite good however needs to be improved again. The inhibiting factor is inadequate infrastructure fulfilled and the lack of firmness of officers in implementing regulations. Meanwhile, the supporting factors are that the number of officers is sufficient and There are SOPs given to officers so that they can be implemented properly.

It is recommended that UPTD Market should make improvements or adequate facilities that are not yet available, the officers who are deployed will be more assertive in carrying out control against traders, and traders need awareness in protecting the surrounding environment.

Keywords: Implementation, Market Management

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Oleh sebab, itu maka banyak masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pedagang. Pedagang pasar adalah pelaku ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung sistem perdagangan tradisional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mereka biasanya menjalankan usaha keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjual beragam produk mulai dari bahan makanan segar hingga pakaian dan peralatan rumah tangga di pasar-pasar tradisional.

Pedagang pasar dikenal memiliki hubungan yang akrab dengan pelanggan tetap mereka, menciptakan ikatan sosial yang kuat di komunitas lokal. Namun, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan munculnya pasar modern seperti supermarket dan pusat perbelanjaan yang menawarkan kenyamanan dan variasi produk yang lebih luas. Selain itu, pedagang pasar sering kali harus berhadapan dengan masalah infrastruktur, seperti fasilitas pasar yang kurang memadai atau kondisi sanitasi yang perlu ditingkatkan.

Pasar daerah memiliki peran vital dalam perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pusat kegiatan ekonomi tradisional, pasar daerah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga mewadahi interaksi sosial dan budaya masyarakat setempat. Di tengah arus modernisasi dan munculnya pusat perbelanjaan modern, eksistensi pasar daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan hingga masalah infrastruktur dan manajemen. Meski demikian, pasar daerah tetap menjadi tumpuan bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta petani lokal dalam memasarkan produk mereka. Pemerintah daerah pun terus berupaya merevitalisasi dan mengembangkan pasar daerah guna mempertahankan perannya sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Pasar induk Amuntai dibangun di wilayah yang ramai dan padat penduduk sehingga keberadaan pasar induk dapat dimanfaatkan sebagai pusat perekonomian yang baik bagi masyarakat sekitar. Begitu pula sama halnya dengan letak Pasar Induk Amuntai yang sangat strategis dan

mudah dijangkau oleh para pengunjung, karena Pasar Induk Amuntai merupakan pasar yang memiliki peran penting bagi aset pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa fenomena masalah pada pasar induk Amuntai, yaitu:

1. Kurangnya penerapan peraturan oleh pihak pengelola pasar kepada para pedagang, yang mengakibatkan masih ada pedagang yang berjualan diluar area yang telah ditentukan oleh pengelola pasar, seperti di lorong-lorong, bawah tangga, bahkan di halaman pasar. Hal ini disebabkan karena kurangnya ketegasan petugas dalam menertibkan pedagang yang berjualan di pasar induk Amuntai dan kurangnya wawasan petugas terhadap isi dari Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar tersebut.
2. Kurangnya fasilitas atau sarana prasarana yang di sediakan oleh pengelola pasar seperti ketersediaan tempat sampah untuk kebersihan, bangunan pasar yang sudah hampir rusak seperti adanya kebocoran saat hujan, kurangnya toilet umum untuk para pedagang, dan kurangnya tempat cuci tangan di pasar yang mengakibatkan area berjualan menjadi kotor dan berkurangnya kenyamanan pedagang maupun pembeli yang berada di pasar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk memenuhi sarana prasarana di pasar induk Amuntai.
3. Masih banyaknya pedagang yang kurang mengetahui dan memahami apa maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang mengakibatkan banyaknya pedagang yang melanggar peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya penyampaian informasi secara berkala dari pihak pengelola pasar terutama kepada PKL, adapun sosialisasi yang dilakukan kepada para pedagang pertokoan dilakukan setiap dua tahun sekali saat perjanjian sewa toko di pasar induk Amuntai.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PADA PASAR INDUK AMUNTAI”**.

Batasan penelitian ini menggunakan teori model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III (Dalam buku Reno Affrian 2023:38-40), implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting yaitu:

1. Komunikasi Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Penelitian terdahulu oleh Fitriani (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B)”**. Menyatakan bahwa Implementasi Peraturan tersebut belum berjalan dengan baik, dari berbagai indikator pernyataan seperti *Pertama*, komunikasi yaitu kejelasan yang belum baik. *Kedua*, sumber daya yaitu dari tidak konsistennya dalam pembayaran retribusi pasar, informasi yang kurang dipahami oleh beberapa dari pedagang. *Ketiga*, sikap pelaksana/disposisi yaitu dari segi insentif yang tidak ada. Sedangkan kegiatan yang berjalan baik yaitu: *Pertama*, komunikasi yaitu transmisi dan konsisten. *Kedua*, sumber daya yaitu mempunyai staf yang sudah tetap dan wewenang yang ada. *Ketiga*, sikap pelaksana/disposisi yaitu sikap komitmen yang sudah sesuai. *Keempat*, struktur birokrat yaitu SOP dan fregmentasi yang sudah sesuai. Faktor yang

mempengaruhi yaitu *Pertama*, penyaluran komunikasi yang belum baik. *Kedua*, adanya hambatan dalam penyeteroran retribusi pelayanan pasar. *Ketiga*, kesulitan dalam penagihan. *Keempat*, kurang pemahaman tentang informasi retribusi pelayanan pasar. Dan Ruselawati (2024) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai tentang “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro Kabupaten Balangan**”. Menyatakan bahwa Implementasi Peraturan tersebut sudah baik, terlihat dari indikator sumber daya manusia sudah cukup baik adanya petugas, sumber daya non manusia sudah baik dengan fasilitas memadai, struktur birokrasi sudah baik yang mana adanya pembagian kerja, SOP cukup baik terdapat peraturan yang disampaikan. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penghambat seperti proyek perbaikan pembangunan di Pasar Adaro yang belum selesai, kurangnya ketegasan petugas dalam penerapan. Sedangkan faktor pendukung yaitu pembagian jadwal patroli secara berkala, sarana dan prasarana yang terpenuhi.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah kebijakan publik menurut Anderson dalam (Muchlis Hamdi, 2015) yang mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan yang bertujuan diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Sedangkan menurut B.W. Hogwood & L.A. Gunn dalam (Muchlis Hamdi, 2015) telah mengidentifikasi arti dari kata publik mencakup pengertian: label untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model, dan proses. Oleh karena itu, Malone dalam (La Mani dan Budi Guntoro, 2020) menyatakan kebijakan publik dapat digambarkan sebagai kerangka kerja keseluruhan tentang tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan publik, studi tentang keputusan pemerintah dan tindakan yang dirancang untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Implementasi kebijakan menurut Laster dan Stewart Jr dalam (Reno Affrian, 2023) menjelaskan Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Sementara itu, Van Meter dan Van Horn dalam (Chazali H. Situmorang, 2016) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

METODE

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Induk Amuntai yang beralamat di Jl. Abdul Azis No.27, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417 dengan 12 informan wawancara yang terdiri dari Kepala Dinas Kuperindag HSU, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar wilayah 1 dan staff pengelolaan pasar Diskuperindag HSU dan pedagang di pasar induk Amuntai.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif – kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi baik foto ataupun video.

Pengolahan data merupakan sebuah tahapan sistematis untuk mengkaji informasi yang dikumpulkan melalui berbagai metode seperti dialog dengan responden, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen. Prosesnya mencakup pengorganisasian informasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu, pemecahan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, penggabungan elemen-elemen terkait, pembentukan struktur yang logis, seleksi informasi berdasarkan tingkat

kepentingannya, dan penarikan simpulan yang dapat dipahami berbagai pihak. “Dalam penelitian kualitatif, beragam sumber menggunakan berbagai teknik pengambilan data yang bervariasi dan berkesinambungan hingga mencapai titik saturasi. Proses pengamatan yang berkelanjutan ini menghasilkan keragaman data yang sangat tinggi. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya data kuantitatif, mayoritas informasi yang terkumpul bersifat kualitatif. Hal ini menyebabkan belum adanya pola yang baku dalam teknik analisisnya, sehingga seringkali menimbulkan tantangan dalam proses pengolahan data.” (Sugiyono, 2021). Dilanjutkan dengan uji kredibilitas data untuk menghasilkan data dan hasil yang valid, (Sugiyono, 2021) “dalam penelitian kualitatif, keabsahan dan keterpercayaan data dapat diverifikasi melalui beberapa metode. Metode-metode tersebut mencakup proses observasi yang diperpanjang, penguatan intensitas penelitian, penggunaan beragam sumber data (metode triangulasi), penelaahan terhadap temuan yang bertentangan, pemanfaatan sumber-sumber rujukan yang relevan, serta pelaksanaan verifikasi dengan partisipan penelitian.”

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan, dan data sekunder atau data pendukung yang bisa di dapatkan dari buku atau dokumen lain yang berhubungan dengan Implementasi pengelolaan pasar, dengan sumber data yang dipilih secara *Purposive Sampling* atau pemilihan informan dengan kualifikasi tertentu yang lebih kompeten dan memahami di bidangnya.

PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut George C. Edwards III (Dalam buku Reno Affrian 2023:38-40), dimana ada 4 variabel untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi Kebijakan, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi Kebijakan

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)

a. Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi dalam kebijakan merupakan aspek penting yang melibatkan komunikasi sistematis mengenai suatu kebijakan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen kebijakan dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara efektif.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator penyampaian informasi cukup baik, hal ini dibuktikan dengan penyampaian informasi kebijakan dalam bentuk sosialisasi lewat brosur, spanduk, serta diberikan SK perjanjian sewa toko, namun masih belum maksimal karena masih ada pedagang yang belum sepenuhnya mengetahui tentang peraturan tersebut.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi dalam kebijakan merupakan aspek penting yang mengacu pada penyampaian informasi kebijakan secara tepat, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multi-tafsir bagi penerima informasi

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa indikator kejelasan informasi kebijakan yang

disampaikan terkait Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar kurang baik, karena masih ada pedagang yang belum memahami isi dari peraturan tersebut.

c. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan adalah keselarasan dan keteraturan dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan, dimana pesan yang disampaikan harus tetap sama dan tidak berubah-ubah meskipun disampaikan melalui berbagai media atau waktu yang berbeda.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penyampaian informasi terkait Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai indikator konsistensi baik, karena informasi yang disampaikan tersebut tetap sama dan jika ada perubahan peraturan akan disampaikan kembali kepada para pedagang di pasar induk Amuntai.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mencapai tujuan implementasi. Dalam sumber daya ini meliputi sumber daya manusia yang mencakup tenaga kerja, keahlian, dan kemampuan individu, serta sumber daya peralatan seperti fasilitas atau infrastruktur yang dibutuhkan dalam proses implementasi.

a. Jumlah Petugas

Jumlah petugas ini menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan keberhasilan penerapan kebijakan dilapangan, dimana ketersediaan petugas yang memadai akan memastikan kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator jumlah petugas sudah baik, karena petugas yang di turunkan untuk menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah mencukupi terutama untuk petugas kebersihan dan petugas trantib pasar yang berjumlah 8 orang.

b. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas untuk implementasi kebijakan adalah ukuran yang menunjukkan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator ketersediaan fasilitas kurang baik, karena fasilitas yang diberikan di pasar induk Amuntai masih belum mencukupi seperti kurangnya tempat sampah di pasar, ketersediaan lapak untuk para pedagang yang membuat banyak PKL yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, kurangnya toilet umum untuk pedagang, serta kurangnya sarana dan prasarana yang di sediakan di pasar induk Amuntai

3. Disposisi

Disposisi yaitu merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku dari para pelaksana kebijakan. Hal ini mencakup bagaimana para implementor memahami dan

menanggapi kebijakan tersebut, termasuk kesediaan mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh.

a. Pengangkatan Petugas

Proses pengangkatan petugas dalam implementasi kebijakan merupakan serangkaian tahapan yang sistematis untuk memilih dan menempatkan individu yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pengangkatan petugas yang menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah baik, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk petugas PNS diangkat dengan seleksi CPNS sedangkan petugas honorer di angkat oleh kepala dinas dengan perjanjian kontrak kerja.

b. Kemampuan Petugas

Kemampuan petugas adalah kapasitas dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator kemampuan petugas yang menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar kurang baik, karena masih kurangnya wawasan petugas mengenai Peraturan tersebut dan masih ada petugas yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

c. Komitmen Petugas

Komitmen petugas dalam menjalankan implementasi kebijakan adalah kesungguhan dan keteguhan sikap seorang petugas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator komitmen petugas yang menjalankan Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar kurang baik, hal itu dapat di lihat dari kurangnya keteguhan petugas dalam menjalankan peraturan di pasar induk Amuntai dan masih ada petugas yang masih lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang diberikan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pihak yang berperan dalam kegiatan implementasi kebijakan tersebut.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah baik, artinya sudah diberikan SOP tersebut kepada para petugas namun SOP tersebut masih yang lama dan perlu di rapatkan kembali agar bisa di perbarui.

b. Pelaksanaan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan merupakan parameter penting yang digunakan untuk mengukur dan memastikan bahwa suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mengenai indikator pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar cukup baik, artinya SOP yang diberikan tersebut sudah sesuai dilaksanakan oleh para petugas pengelola pasar seperti petugas kebersihan dan keamanan pasar namun masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan lagi dalam menjalankan SOP tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar Pada Pasar Induk Amuntai sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

a. Jumlah Petugas Yang Sudah Mencukupi

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor pendukung, yaitu jumlah petugas yang di turunkan sudah mencukupi untuk mengelola pasar induk Amuntai, seperti petugas kebersihannya juga sudah banyak dan petugas trantib pasar yang berjumlah 8 orang.

b. Adanya SOP Yang Diberikan Kepada Para Petugas Untuk Menjalankan Peraturan di Pasar Induk Amuntai

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor pendukung, yaitu dengan adanya SOP yang diberikan kepada petugas pengelola pasar, dapat memudahkan para petugas dalam menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan SOP yang diberikan.

2. Faktor Penghambat

a. Sarana dan Prasarana Yang Belum Terpenuhi

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor penghambatnya, yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan di pasar induk Amuntai seperti tempat sampah, mesin pembersih selokan, tempat cuci tangan, dan pos tempat pengaduan para pedagang. Selain itu untuk infrastrukturnya juga kurang baik karena pasarnya sudah lama dibangun.

b. Kurangnya Ketegasan Petugas Dalam Penerapan Peraturan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar mengenai faktor penghambatnya, yaitu kurangnya ketegasan para petugas dalam menerapkan peraturan di pasar induk Amuntai sehingga masih ada pedagang yang berani melanggar, serta kurangnya kesadaran para pedagang yang tidak mematuhi peraturan di pasar induk Amuntai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai cukup baik. *Pertama*, sub variabel komunikasi kebijakan pada indikator a. Penyampaian informasi cukup baik, karena masih ada pedagang yang tidak mengetahui atau kurang sosialisasi tentang Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar di pasar induk Amuntai tersebut. Pada indikator b. Kejelasan informasi kurang baik, karena masih ada pedagang yang kurang memahami maksud dari peraturan tersebut. Pada indikator c. Konsistensi baik, karena informasi yang disampaikan tersebut tetap sama dan jika ada perubahan peraturan akan disampaikan kembali kepada para pedagang di pasar induk Amuntai. *Kedua*, sub variabel Sumber Daya pada indikator a. Jumlah petugas baik, karena petugas yang di turunkan untuk mengelola pasar induk Amuntai sudah mencukupi terutama untuk petugas kebersihan dan trantib pasar. Pada indikator b. Ketersediaan fasilitas kurang baik, karena masih kurangnya fasilitas di pasar induk Amuntai seperti ketersediaan lapak untuk pedagang, tempat sampah, dan mesin pembersih selokan, serta sarana dan prasarana di pasar induk Amuntai yang belum terpenuhi. *Ketiga*, sub variabel Disposisi pada indikator a. Pengangkatan petugas yang menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar sudah baik, karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari dinas terkait. Pada indikator b. Kemampuan petugas kurang baik, karena masih kurangnya wawasan petugas mengenai peraturan tersebut dan masih ada petugas yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Pada indikator c. Komitmen petugas kurang baik, karena kurangnya ketegasan petugas dalam menjalankan aturan di pasar induk Amuntai dan masih ada petugas yang lalai dalam menjalankan tugasnya. *Keempat*, sub variabel Struktur Birokrasi pada indikator a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik, karena memang adanya SOP yang diberikan kepada para petugas untuk menjalankan peraturan di pasar induk Amuntai namun SOP tersebut perlu di perbarui lagi karena sudah lama. Pada indikator b. Pelaksanaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) cukup baik, artinya SOP yang diberikan tersebut sudah sesuai dilaksanakan oleh para petugas pengelola pasar seperti petugas kebersihan dan keamanan pasar namun perlu lebih ditingkatkan lagi.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar pada Pasar Induk Amuntai terbagi dua yaitu:
 - a. Faktor Pendukung yaitu jumlah petugas yang di turunkan sudah mencukupi untuk mengelola pasar induk Amuntai, seperti petugas kebersihan nya juga sudah banyak dan petugas trantib

pasar yang berjumlah 8 orang dan dengan adanya SOP yang diberikan kepada para petugas, mereka dapat menjalankan peraturan di pasar induk Amuntai dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. b. Faktor Penghambat yaitu ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di pasar induk Amuntai serta kurangnya ketegasan dari petugas dalam menertibkan pedagang yang melanggar peraturan seperti berjualan di tempat yang tidak seharusnya serta kurangnya kesadaran pedagang dalam mematuhi peraturan di pasar induk Amuntai.

Penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini berdasarkan hasil yang ditunjukkan di atas, antara lain:

1. Kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara:
 - a. Untuk UPTD Pasar sebaiknya melakukan perbaikan pada bangunan pasar yang sudah hampir rusak dan mencukupi fasilitas atau sarana prasarana yang belum tersedia di pasar induk Amuntai untuk kenyamanan para pedagang.
 - b. Petugas yang menjalankan peraturan di pasar induk Amuntai agar lebih tegas dalam menertibkan para pedagang yang tidak mematuhi peraturan.
 - c. Perlu melakukan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada pedagang toko maupun PKL tentang peraturan yang dijalankan sehingga dapat menghilangkan budaya yang kurang baik dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
2. Kepada Para Pedagang di Pasar Induk Amuntai:
 - a. Lebih meningkatkan kesadarannya untuk mematuhi Peraturan Daerah Dengan Nomor 17 Yang Diterbitkan Pada Tahun 2013 Berkaitan Dengan Sistem Pengelolaan Pasar pada pasar induk Amuntai.
 - b. Harus peduli terhadap lingkungan di sekitar agar selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat berjualan di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Fitriana (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Itik Alabio Blok A dan B)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Hamdi, M. (2015) *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Edited by R. Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mani, L. and Guntoro, B. (2020) *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik*. Edited by P. Latifah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ruselawati (2024) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Adaro Kabupaten Balangan*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.



Situmorang, C.H. (2016) *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.

Depok: SOCIAL SECURITY DEVELOPMENT INSTITUTE (SSDI).

Sugiyono (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2nd edn. Edited by Sutopo.

Bandung: CV Alfabeta.